JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI SAMUDRA (JMAS)
Volume 5 Nomor 2, APRIL 2024. HALAMAN 88 - 96
e- ISSN : 27970086
p- ISSN : 27970434

DETERMINAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA LANGSA (Studi Empiris di OPD Kota Langsa)

Nova Ardiana[a*], Afrah Junita[b], Tuti Meutia[c]
[a,b,c]Fakultas Ekonomi,Universitas Samudra
**Email : ardiananovard@gmail.com*

Abstract

This study investigates the influence of the Local Government Financial Accounting System, Human Resource Capacity, accounting understanding, local financial management practices, and Government Accounting Standards implementation on the quality of financial reporting in Langsa City. Utilizing a saturation sampling technique, the entire population was included as the sample, facilitating the research process. Thirty government agencies (SKPD) were involved, and data were collected through questionnaires. The research findings, represented by the regression equation Y = 2.140 + 0.235X1 + 0.227X2 + 0.256X3 + 0.115X4 + 0.227X5, indicate a positive impact of variables such as the Local Government Financial Accounting System (X1), Human Resource Capacity (X2), accounting understanding (X3), Local Financial Management (X4), and Government Accounting Standards Implementation (X5) on the quality of local government financial reporting. Each one-unit increase in these variables contributes to an increase of 0.235, 0.227, 0.256, 0.115, and 0.227 respectively in the quality of financial reporting. The audit conducted by the Supreme Audit Agency (BPK) on the Langsa City Government Financial Report for the year 2018 revealed issues related to Internal Control Systems and compliance with regulations. The research results affirm that the Local Government Financial Accounting System, Human Resource Capacity, accounting understanding, Local Financial Management, and Government Accounting Standards Implementation play crucial and positive roles in enhancing the Quality of Local Government Financial Reporting. One limitation encountered during the research was in distributing questionnaires to the Regional Apparatus Organization (OPD). In this process, there were incidents where some OPDs, targeted to receive questionnaires intended for multiple respondents, were completed by only one person. This necessitated adjustments to the sample, reducing the planned five sections to four. Additionally, during questionnaire distribution, there were cases where respondents were not relevant to their positions within the organizational structure targeted. These limitations affect the validity and representativeness of the collected data, necessitating corrections and adjustments in the analysis and interpretation of research findings.

Keywords: *Human Resources Competency, Local Government Financial Accounting System, LKPD.*

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, pemahaman akuntansi, praktik manajemen keuangan lokal, dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan di Kota Langsa. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh, seluruh populasi diikutsertakan sebagai sampel, memudahkan proses penelitian. Ada 30 lembaga pemerintah (SKPD) yang terlibat, dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Temuan penelitian, yang diwakili oleh persamaan regresi Y = 2,140 + 0,235X1 + 0,227X2 + 0,256X3 + 0,115X4 + 0,227X5, menunjukkan dampak positif variabel seperti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1), Kapasitas Sumber Daya Manusia (X2), Pemahaman akuntansi (X3), Manajemen Keuangan Daerah (X4), dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (X5) terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Setiap peningkatan satu satuan pada variabel-variabel ini berkontribusi pada peningkatan masing-masing sebesar 0,235, 0,227, 0,256, 0,115, dan 0,227 dalam

kualitas pelaporan keuangan. Pemeriksaan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa tahun 2018 mengungkapkan masalah terkait Sistem Pengendalian Internal dan kepatuhan terhadap peraturan. Hasil penelitian menegaskan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, pemahaman akuntansi, Manajemen Keuangan Daerah, dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berperan penting dan positif dalam meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu keterbatasan yang saya hadapi selama penelitian ini adalah saat memberikan kuesioner kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam proses tersebut, terjadi beberapa insiden di mana beberapa OPD yang ditargetkan menerima kuesioner yang seharusnya diisi oleh beberapa responden, namun ternyata hanya diisi oleh satu orang saja. Hal ini mengakibatkan perlunya penyesuaian terhadap sampel, di mana dari lima bagian yang awalnya direncanakan, akhirnya hanya terdiri dari empat bagian. Selain itu, selama proses penyebaran kuesioner, terdapat juga beberapa kasus di mana responden yang mengisi kuesioner tidak relevan dengan jabatannya dalam struktur organisasi yang dituju. Keterbatasan ini mempengaruhi validitas dan representativitas data yang terkumpul, serta menuntut koreksi dan penyesuaian dalam analisis dan interpretasi hasil penelitian.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, LKPD

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai entitas sektor publik memiliki kewajiban untuk menjalankan transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses dan aktivitas ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat karena melibatkan kepercayaan terhadap pengelolaan dana oleh Pemerintah. PP No. 24 Tahun 2005 menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai tuntutan bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan transparan dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, sesuai dengan ketentuan SAP. Tujuan utama dari pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemberi dana dan pihak lainnya yang menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan alokasi dana secara rasional terhadap organisasi tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya agar dapat menyajikan informasi keuangan yang diperlukan oleh berbagai pihak. Masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai aktivitas ekonomi dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai auditor pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menguji kepatuhan terhadap proses pelaporan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan yang memiliki dampak signifikan terhadap penyajian laporan keuangan daerah. Temuan yang ditemukan oleh BPK dalam setiap pemeriksaan terhadap proses pelaporan dan laporan keuangan daerah harus menjadi fokus perhatian bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Meskipun demikian, dari informasi yang diperoleh dari BPK, masih banyak hasil yang menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah belum mencapai tingkat kualitas yang optimal.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa untuk tahun anggaran 2018, beberapa masalah masih ditemukan. Meskipun

masalah tersebut tidak mempengaruhi kesesuaian penyajian laporan keuangan, beberapa temuan penting muncul terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan SPI mencakup pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal dan penatausahaan persediaan obat dan barang medis habis pakai yang kurang memadai. Temuan terkait kepatuhan antara lain adalah pembayaran gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan anggota DPR Kota Langsa yang tidak sesuai ketentuan, serta pendapatan bagi hasil dari PT. Pelabuhan Kota Langsa (Pekola) yang kurang diterima.

BPK sangat berharap bahwa Pimpinan Pemerintah Kota Langsa mampu menjalankan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dengan disiplin, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.Untuk menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan sumber daya yang memadai dalam proses pelaporannya. Beberapa sumber daya yang sangat penting dalam mendukung proses tersebut termasuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM), dan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip akuntansi.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pihak yang memberi wewenang (principal) dan pihak yang menerima wewenang (agent), di mana agent diharapkan bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Hal ini relevan dalam konteks pemerintah daerah, di mana hubungan keagenan antara eksekutif (kepala daerah) dan legislatif (DPRD) serta antara legislatif dan masyarakat dapat terjadi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperkuat hubungan keagenan tersebut. Masalah ketidaksimetrisan informasi dalam hubungan keagenan tersebut dapat diatasi melalui pelaporan keuangan daerah, yang menjadi alat pemantauan bagi principan (pihak yang memberi wewenang) untuk memastikan bahwa agent (pihak yang menerima wewenang) bertindak sesuai dengan kesepakatan awal.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah (agent) untuk bertanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah (principal), baik otoritas yang lebih tinggi maupun masyarakat luas. Dalam konteks ini, praktek pelaporan keuangan di pemerintah daerah didasarkan pada konsep teori keagenan, di mana pemerintah daerah sebagai agent bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

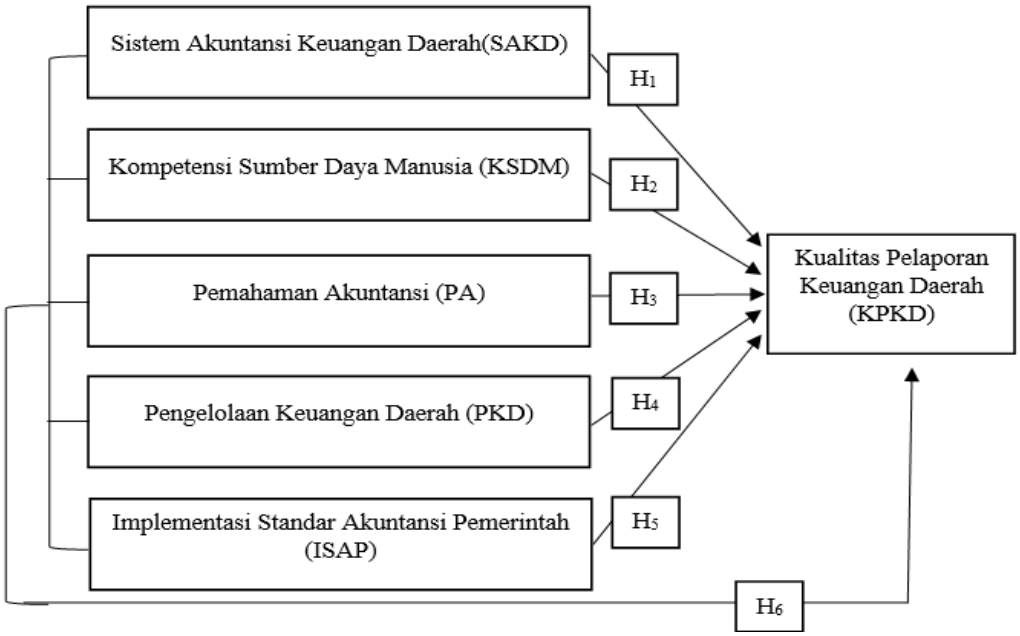
Sistem akuntansi keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan keandalan laporan dan pelaporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah kepada pemangku kepentingan. Hasil penelitian Ahmad Badjuri (2020), penelitian ini menegaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki dampak positif dan penting terhadap kualitas pelaporan keuangan Kabupaten Aceh Besar.

Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi yang baik dari sistem akuntansi keuangan daerah secara signifikan memengaruhi kualitas pelaporan keuangan di daerah tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan dan pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan daerah, semakin meningkat pula kualitas pelaporan keuangannya.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Penelitian Heru Mulyadi dan koleganya (2020) yang menunjukkan bahwa tingkat kompetensi sumber daya manusia memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Surakarta. Ini mengimplikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi pegawai yang berada di bidang akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah Surakarta, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pemerintah daerah untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten, baik dalam hal jumlah maupun kemampuan.



Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga akan menginvestigasi apakah kompetensi sumber daya manusia memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemahaman yang lebih mendalam tentang akuntansi juga akan dieksplorasi dalam konteks pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, penelitian ini akan mempertimbangkan apakah pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Terakhir, penelitian ini akan menyelidiki apakah implementasi standar akuntansi pemerintah berperan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan menguraikan

variabel-variabel ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Kota (OPD) Kota Langsa, yang berjumlah 30 OPD dalam penelitian ini, akan dijadikan sebagai populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik Sampling Jenuh, di mana seluruh populasi akan diambil sebagai sampel. Responden dipilih dengan beberapa kriteria, sehingga hanya melibatkan tiga jabatan kunci sebagai responden: Kabag Keuangan, Bendahara, dan Staf Keuangan. Oleh karena itu, total jumlah responden adalah 120 orang.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penggunaan kuesioner (angket), suatu pendekatan penelitian di mana data diperoleh dengan mendistribusikan kuesioner kepada responden yang menjadi sampel, kemudian hasilnya dianalisis menggunakan metode analisis statistik. Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup dengan menggunakan skala Likert untuk mengklasifikasi variabel yang diukur, sehingga membantu dalam mencegah kesalahan dalam analisis data dan penelitian selanjutnya.

Metode Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif, menggunakan data numerik dan metode statistik untuk menguji hipotesis serta memanfaatkan beberapa alat analisis tambahan.Statistical Package for Social Sciences (SPSS) mejadi alat analisis pada penelitian ini yag dikelola dengan sarana komputer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Koefesien Determinasi (R2)

Tabel 4.1 Uji Adjusted

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,681[a]	,501	,601	1,591
a. Predictors: (Constant), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Pemahaman Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia				
b. Dependent Variable: Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah				

Sumber : Data Primer, diolah (2022)

Dari tabel terlihat bahwa nilai Adjusted R Square mencapai 0,601 atau setara dengan 60,1%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, pengelolaan keuangan daerah, dan implementasi standar akuntansi pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap

kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, mencapai 60,1%. Sebesar 39,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji Parsial (t)

Tabe 4.11Hasil Uji t

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,140	4,825		,444	,658
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,235	,096	,227	2,453	,016
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	,227	,129	,202	1,770	,019
	Pemahaman Akuntansi	,256	,061	,333	4,217	,000
	Pengelolaan Keuangan Daerah	,115	,138	,088	,832	,021
	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	,227	,073	,252	3,125	,002
a. Dependent Variable: Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah						

Sumber : Data Primer, diolah (2022)

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan t hitung 2,453 dan nilai signifikansi 0,016. Kapasitas sumber daya manusia (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, meskipun dengan t hitung 1,770 dan nilai signifikansi 0,019. Pemahaman Akuntansi (X_3) menunjukkan pengaruh positif yang kuat terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, didukung oleh t hitung 4,217 dan nilai signifikansi 0,000. Pengelolaan Keuangan Daerah (X_4) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, meskipun tidak signifikan, dengan t hitung 0,832 dan nilai signifikansi 0,021. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (X_5) juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, ditunjukkan oleh t hitung 3,125 dan nilai signifikansi 0,002.

Uji Simultan (F)

Tabel 4.1 Hasil Uji F

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	296,935	5	59,387	10,986	,000[b]
	Residual	616,265	114	5,406		
	Total	913,200	119			
a. Dependent Variable: Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah						
b. Predictors: (Constant), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Pemahaman Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia						

Sumber : Data Primer, diolah (2022)

Dari tabel terlihat bahwa nilai F hitung adalah 10,986 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti sistem akuntansi keuangan daerah (X_1), Kapasitas sumber daya manusia (X_2), pemahaman akuntansi (X_3), pengelolaan keuangan daerah (X_4), dan

implementasi standar akuntansi pemerintah (X_5) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kota Langsa.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Langsa telah menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil kuesioner menunjukkan mayoritas responden (32,2% sangat setuju dan 57% setuju) mendukung sistem tersebut.Implikasi teori keagenan pada penelitian ini menekankan pentingnya pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBN kepada masyarakat. Sistem akuntansi yang handal dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang relevan, andal, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, penerapan sistem akuntansi keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah kepada pemangku kepentingan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di OPD Kota Langsa cukup unggul, yang tercermin dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa dari BPK, serta penghargaan terbaik dari BPPSDM Aceh kepada Dinas BKPSDM Kota Langsa atas inovasi corporate university. Ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur, sehingga penyajian dan pelaporan keuangan dapat berjalan dengan baik. Kuesioner juga menunjukkan dukungan yang kuat terhadap kompetensi SDM, dengan 33,1% responden sangat setuju dan 57,3% setuju. Teori keagenan memperjelas hubungan antara prinsipal (masyarakat) yang menginginkan pelaporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, dengan agen (pemerintah daerah) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban tersebut. Kualitas SDM menjadi kunci dalam memastikan kepentingan prinsipal terjaga, dan kualitas pelaporan keuangan tetap optimal.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi di OPD Kota Langsa cukup memadai, namun masih terdapat hambatan dalam proses pelaporan keuangan daerah akibat kurangnya pemahaman akuntansi di beberapa instansi atau OPD di Kota Langsa. Data dari kuesioner menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi terhadap pemahaman akuntansi, dengan 28,8% responden sangat setuju dan 55,5% setuju. Teori keagenan adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara prinsipal (masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya) dan agen (pemerintah daerah atau pejabat pemerintah) dalam konteks pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemahaman akuntansi menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, dengan DPRD memiliki peran dalam memilih dan mengangkat kepala

daerah yang memiliki pemahaman akuntansi yang memadai. Teori keagenan membantu dalam memahami dinamika hubungan antara prinsipal dan agen dalam mencapai tujuan tersebut.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa OPD di Kota Langsa telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Mereka telah menunjukkan komitmen dalam mengelola keuangan daerah dengan menyajikan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Langsa sebagai laporan akuntabilitas kinerja tahunan, yang mencakup pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan. Opini WTP dari BPK selama sepuluh tahun berturut-turut juga mengonfirmasi kualitas pelaporan keuangannya. Kuesioner juga menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pengelolaan keuangan daerah, dengan 35,3% responden sangat setuju dan 57% setuju. Teori keagenan menekankan pentingnya pemilihan agen yang kompeten dan dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemilihan agen yang tepat dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan karena mereka memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip akuntansi dan standar pelaporan keuangan

Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa telah mematuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Implementasi standar akuntansi pemerintah di Kota Langsa berjalan lancar, memastikan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah terjaga. Misalnya, pencatatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik, yang berkontribusi pada penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Hasil kuesioner juga menunjukkan dukungan yang kuat terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah, dengan 31,5% responden sangat setuju dan 51,1% setuju. Teori keagenan dan implementasi standar akuntansi pemerintah menekankan bahwa pemerintah sebagai agen harus memastikan pelayanan yang optimal kepada publik sebagai prinsipal. Prinsipal mengharapkan kinerja terbaik dari agen, dan salah satu caranya adalah dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat dipercaya.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dalam penelitian, seperti sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, pengelolaan keuangan daerah, dan implementasi standar akuntansi pemerintah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kota Langsa. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kesulitan dalam mengumpulkan data responden di OPD Kota Langsa karena kesibukan responden sendiri.

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, disarankan agar SKPK di Kota Langsa memperkuat sistem pengendalian internal dengan melakukan identifikasi risiko secara berkala, mendokumentasikan prosedur operasional, melakukan

audit internal, memisahkan tugas, dan memanfaatkan teknologi terbaru. Pelatihan reguler juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas karyawan, termasuk pengembangan keterampilan teknis terkait tugas masing-masing, seperti penggunaan sistem informasi keuangan dan analisis data. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel tambahan dan mengembangkan penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

REFERENSI

Abdullah, Ridwan., 2013, Inovasi Pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta.

Imam Ghozali, 2011, Aplikasi Analisis Multivariate dangan Program IBM SPSS19, Edisi 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Imam Ghozali, 2016, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 TentangStandar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Revaldo, Andre. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah,Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan (Studi Pada SKPK Di Kota Langsa).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Wijayanti Ratna, 2017, “Pengaruh Kompetensi SDM Dan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 6 No. 3:1295.